**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan yang berasaskan otonomi daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat juga peningkatan dari segi efektivitas dan efisiensi daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:175). Sebagai pihak pemegang amanah, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Didalam laporan keuangan pemerintah daerah berisi informasi keuangan daerah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan berkualitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila di dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik relevan, andal , dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam era globalisasi pada saat ini, segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan sangat cepat. Seiring dengan kemajuan zaman yang mengakibatkan berkembangnya teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2012:10) terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil berguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme. *Good Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat dan akurat untuk setiap masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu, laporan keuangan, kinerja pemerintahan, peraturan pemerintahan dan disusun sesuai dengan standard yang berkualitas tinggi.

Selain *good governance*, komitmen organisasi dari pegawai didalam organisasi juga berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal didalam organisasi tersebut serta kesediaan orang tersebut untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasa dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014:837) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada pegawai akan bertahan di dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dapat ditarik benang merah bahwa untuk membuat suatu laporan keuangan agar mempunyai kualitas laporan keuangan daerah yang berkualitas harus dilaksanakan dengan tata kelola pemerintah yang baik yaitu *good governance*. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksana *good governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan akurat. Dengan terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik akan meningkatkan kesadaran dan hasil kinerja dari pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dan dengan di dukung oleh komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap pegawai yang berada didalam organisasi sehigga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah selanjutnya akan di audit dan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berikut opini laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang tahun 2012-2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dapat dilihat di tabel 1.1 mengenai opini laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang tahun 2012-2016 dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Kota Palembang Tahun 2012-2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Opini |
| 1 | Tahun 2012 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 2 | Tahun 2013 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 3 | Tahun 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 4 | Tahun 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 5 | Tahun 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |

*Sumber : IHPS 1 Laporan Keuangan, 2017*

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) pada tabel 1.1 opini audit Kota Palembang tetap stabil dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya.KotaPalembang satu-satunya Kota dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan yang meraih predikat WTP tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2010 *(Sumber: ampera.co, diakses 21/3/2018* *).* Namun, menurut Menteri Keuangan, mendapatkan opini WTP bukan berarti memastikan bahwa kinerja Kementerian/Lembanga tersebut, dalam penerapan *good governance* dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik. “Mendapatkan opini WTP tidak serta merta jaminan tidak adanya praktek penyimpangan, pemborosan atau inefisiensi, bahkan mungkin kecurangan.” kata Menkeu saat menyampaikan sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan K/L *(Sumber: kemenkeu.go.id, diakses 21/3/2018)*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”.**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara simultan?

**1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan yaitu pada *good governance*, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan daerah. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari Februari s.d Mei 2018. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan unit pengamatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara parsial
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang secara simultan
	* 1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai *good governance* dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1. Manfaat Praktisi Bagi Instansi
	1. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
	2. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referesi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik yang sejenis.